



## **PENGARUH SUMBER DAYA ALAM DAN SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PENERIMAAN DAERAH**

**Jolianis**

Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP- PGRI Sumbar  
Jl. Gunung Pangilun No.1, Padang Sumatera Barat  
Email : [jolianiskoto@ymail.com](mailto:jolianiskoto@ymail.com)

submitted: 14.05.17 reviewed:14.07.30 accepted: 14.10.30  
<http://dx.doi.org/10.22202/economica.2014.v3.i1.235>

### ***Abstract***

*This study aims to reveal the effect of natural resources and human resources to the regional revenues together or in partial. This research is a quantitative research causative. Data analysis techniques used to perform hypothesis testing is multiple linear regression analysis. Results of the study found that : 1) Put together natural resources and human resources significant effect on local revenues. 2) Natural resources significantly influence the regional revenues. 3) Human resources significantly influence the regional revenues.*

### ***Abstrak***

*Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan pengaruh sumber daya alam dan sumber daya manusia terhadap penerimaan daerah secara bersama-sama maupun secara parsial. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bersifat kausatif. Teknik analisis data yang digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menemukan bahwa : 1) Secara bersama-sama sumber daya alam dan sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap penerimaan daerah. 2) Sumber daya alam berpengaruh signifikan terhadap penerimaan daerah. 3) Sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap penerimaan daerah.*

*Keywords : Regional Revenues, Natural Resources and Human Resources*

## PENDAHULUAN

Keberhasilan otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari kemampuan daerah di bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting guna mengukur tingkat otonomi suatu daerah karena untuk menjalankan fungsi pemerintahan faktor keuangan merupakan suatu hal yang sangat penting, karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya untuk operasional.

Tujuan Otonomi Daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 pada dasarnya adalah sama yaitu otonomi diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu secara nyata dan bertanggung jawab, sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban dan campur tangan pemerintah pusat di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi lokal.

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan yang menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang semakin mantap, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dengan meningkatkan penerimaan sumber PAD yang sudah ada maupun dengan penggalan sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Di sisi lain, saat ini kemampuan keuangan beberapa Pemerintah Daerah masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, bersamaan dengan semakin sulitnya

keuangan negara dan pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri, maka kepada setiap daerah dituntut harus dapat membiayai diri sendiri melalui sumber-sumber keuangan yang dikuasainya. Peranan Pemerintah Daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah.

Peningkatan PAD sangat menentukan sekali dalam penyelenggaraan otonomi daerah karena semakin tinggi PAD disuatu daerah maka daerah tersebut akan menjadi mandiri dan mengurangi ketergantungan kepada pusat sehingga daerah tersebut mempunyai kemampuan untuk berotonomi. Jadi PAD merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Biasanya penerimaan PAD untuk masing-masing daerah berbeda dengan yang lainnya, rendahnya PAD merupakan indikasi nyata di mana masih besarnya ketergantungan daerah kepada pusat terhadap pembiayaan pembangunan baik langsung maupun tidak langsung. Hal ini disebabkan di samping rendahnya potensi Pendapatan Asli Daerah di daerah juga disebabkan kurang intensifnya pemungutan pajak dan retribusi di daerah.

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan wilayah yang komponennya berisikan berbagai kegiatan pembangunan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Untuk melaksanakan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota setiap tahunnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Berikut ini adalah data tentang realisasi APBD dan kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Lima Puluh Kota selama 5 tahun terakhir :

**Tabel 1. APBD Kabupaten Lima Puluh Kota**

No	Tahun	APBD		Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD
		Total	Pert	
1	2005	352.673.319.400,00	-	-
2	2006	393.190.316.142,00	11,79	4,27
3	2007	457.777.565.329,31	16,43	3,86
4	2008	510.088.812.146,98	11,43	3,99
5	2009	530.702.450.525,10	4,04	3,68

Sumber : BPS Kabupaten Lima Puluh Kota, 2013

Dari data di atas terlihat APBD secara kuantitas mengalami peningkatan setiap tahun tetapi persentasenya mengalami perubahan yang berfluktuasi setiap tahunnya. Selanjutnya terlihat bahwa relatif kecilnya kontribusi PAD terhadap APBD setiap tahunnya dan persentasenyapun mengalami penurunan setiap tahun. Terjadinya penurunan kontribusi PAD terhadap APBD tentunya disebabkan adanya kegagalan pemerintah dalam menggali potensi perekonomian sehingga PAD tidak mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya.

**Tabel 2. PAD, SDA dan Angkatan Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota**

No	Tahun	PAD		SDA		Angkatan Kerja	
		Total (Juta Rupiah)	Pert	Total (Juta Rupiah)	Pert	Indeks SDM	Pert.
1	2005	19,764,4	-	875,996,44	-	161,240	-
2	2006	16,786,4	(15,06)	927,679,97	5,89	142,845	18,77
3	2007	17,681,9	5,33	989,755,56	6,69	167,603	(11,41)
4	2008	20,337,8	15,02	1,048,552,59	5,94	168,030	17,33
5	2009	19,514,1	(4,04)	1,107,349,290.	5,60	182,352	0,25

Sumber : BPS Kabupaten Lima Puluh Kota, 2013

Berdasarkan data pada Tabel 2 terlihat bahwa pemerintah daerah tidak mampu mengoptimalkan potensi penerimaan daerah karena diperlihatkan oleh perubahan yang berfluktuasi dari pendapatan asli daerah, pertumbuhan dari pendapatan sektor sumber daya alam, pendapatan sektor industri dan indeks sumber daya manusia. Terlihat bahwa apabila terjadi peningkatan ataupun penurunan PAD tidak selalu diikuti oleh peningkatan dan penurunan dari pendapatan dari sektor sumber daya alam, industri dan indeks sumber daya manusia.

Fenomena di atas ini merupakan indikasi dari kurang efektifnya pemerintah dalam meningkatkan potensi penerimaan

Dalam prakteknya penerimaan daerah ini sangat dipengaruhi oleh banyak sektor, dimana apabila sektor-sektor dalam perekonomian mengalami perkembangan yang cukup baik tentunya akan menyebabkan terjadinya peningkatan dari penerimaan daerah. Menurut Boediono (2002:61) bahwa potensi penerimaan daerah terdiri dari 1) PDRB sektor sumber daya alam (primer), 2) PDRB sektor industri dan jasa lainnya (non primer), 3) besarnya angkatan kerja.

Adapun penerimaan daerah, sumber daya alam dan sumber daya manusia dapat dilihat dari tabel 1 berikut ini:

daerah karena pada prinsipnya persentase pertumbuhan dari pendapatan sektor sumber daya alami itu mengalami peningkatan setiap tahunnya agar penerimaan daerah juga mengalami peningkatan.

Fenomena yang terjadi pada pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam meningkatkan potensi penerimaannya disebabkan oleh banyak faktor. Penulis mengasumsikan bahwa faktor yang paling dominan mempengaruhi potensi penerimaan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah pendapatan sektor sumber daya alam, pendapatan sektor industri dan indeks sumber daya manusia. Dimana dengan adanya peningkatan dari

pendapatan sektor sumber daya alam, pendapatan sektor industri dan peningkatan indeks sumber daya manusia akan meningkatkan juga potensi penerimaan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Menurut Boediono (2002) bahwa potensi penerimaan daerah terdiri atas variabel-variabel sebagai berikut : 1) PDRB sektor sumber daya alam (primer), 2) PDRB sektor indsutri dan jasa lainnya (non primer), 3) Besarnya angkatan kerja.

Jika kita lihat bahwa pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai potensi yang tinggi untuk meningkatkan penerimaannya karena daerah ini mempunyai sumber daya yang cukup untuk dikembangkan yaitu:

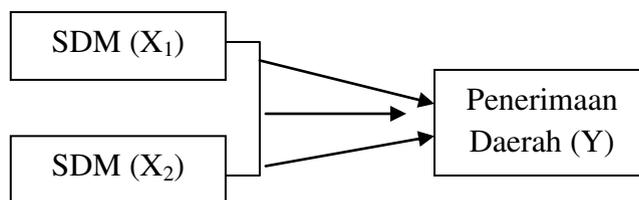
1. Potensi sumber daya alam banyak hal ini dapat kita lihat dari:
  - a. Luasnya kebun gambir
  - b. Luasnya kebun karet
  - c. Adanya kebun sawit
  - d. Memiliki batu bara
  - e. Subur dan luas areal perkebunan
  - f. Banyaknya perternakan unggas
  - g. Dan lain-lainnya
2. Sumber daya manusia dengan tingkat pendidikan cukup tinggi
3. Letak daerah yang strategis, hubungan lancar dan luas
4. Potensi lain yang cukup banyak seperti adanya industri Marmar dan batu bata

di samping kemampuan berdagang yang baik.

Dari beberapa hal di atas kita yakin otonomi daerah merupakan sistem pemerintahan yang pas dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Namun semua potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Lima Puluh Kota masih belum dapat digali seoptimal mungkin, hal ini terlihat pada fluktuasi pertumbuhan PAD sebagai mana terlihat pada tabel di atas. Semua ini disebabkan masih rendahnya kontribusi yang diberikan oleh sumber daya manusia terhadap potensi sumber daya alam dan potensi industri di Kabupaten Lima Puluh Kota, hal ini disebabkan masih rendahnya indeks sumber daya manusia (0,49) Kabupaten Lima Puluh Kota dibandingkan indeks rendahnya indeks sumber daya manusia propinsi Sumatera Barat (0,70).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis : 1) Pengaruh sumber daya alam dan sumber daya manusia secara bersama-sama terhadap penerimaan daerah, 2) Pengaruh sumber daya alam terhadap penerimaan daerah, 3) Pengaruh sumber daya manusia terhadap penerimaan daerah.

Secara konseptual dapat digambarkan kerangka berpikir penelitian ini adalah sebagai berikut



**Gambar 1. Kerangka Konseptual**

Adapun hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini adalah: 1) Sumber daya alam dan sumber daya manusia secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan daerah, 2) Sumber daya alam berpengaruh signifikan terhadap penerimaan daerah, 3) Sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap penerimaan daerah.

**Metodologi Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bersifat kausatif. Menurut Sugiyono (2007:41) bahwa penelitian kuantitatif yang bersifat kausatif dimana berbicara dengan angka-angka serta melihat pengaruh antara variabel bebas (independen) dengan variabel terikat (dependent). Jenis data yang digunakan adalah data dokumenter yaitu data yang

sudah jadi yang memuat tentang penerimaan daerah berupa pendapatan asli daerah, sumber daya alam dan sumber daya manusia. Data dokumenter ini diperoleh dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dan BPS Kabupaten Lima Puluh Kota selama 30 tahun terakhir (1980-2009)

Variabel penelitian ini terdiri dari dua variabel bebas yaitu sumber daya alam ( $X_1$ ), dan sumber daya manusia ( $X_2$ ) serta satu variabel terikat yaitu penerimaan daerah ( $Y$ ). Penerimaan daerah yang dimaksud pada penelitian ini total penerimaan daerah yang diukur dari realisasi pendapatan asli daerah (PAD) selama 30 tahun terakhir yaitu tahun 1980-2009. Total pendapatan asli daerah ini akan dihitung dalam satuan rupiah. Sumber daya alam yang dimaksud pada penelitian ini adalah total penerimaan dari sektor-sektor yang termasuk dalam sumber daya alam selama 30 tahun terakhir yaitu

**Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas**

No	Variabel	Tolerance	VIF
1	SDA ( $X_1$ )	0,714	1,096
2	SDM ( $X_2$ )	0,787	1,271

Sumber: Pengolahan data sekunder, 2013

Berdasarkan hasil olahan data diketahui bahwa nilai *tolerance* dari *Collinearity Statistics* mendekati 1 dan nilai *VIF* (*Variance Inflation Factor*) untuk semua variabel bebas di bawah 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat kasus multikolinearitas antara sesama variabel bebas.

## 2) Uji Autokorelasi

Autokorelasi digunakan apabila data yang digunakan adalah data *time series*, gunanya adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh nilai DW adalah sebesar 1,974. Dengan demikian dapat

periode 1980-2009. Total pendapatan potensi penerimaan dari sektor sumber daya alam ini akan dihitung dalam satuan rupiah. Sumber daya manusia yang dimaksud pada penelitian ini adalah jumlah angkatan kerja selama 30 tahun terakhir. Variabel potensi sumber daya manusia pada penelitian ini di ukur dalam satuan jumlah orang. Teknik analisis data untuk pengujian hipotesis adalah regresi berganda.

## A. Hasil Uji Asumsi Klasik

### 1) Uji Multikolinearitas

Tujuan dilakukan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah sesama variable independent terjadi korelasi atau hubungan antara satu variable dengan variable yang lain. Dalam menggunakan analisis regresi linear berganda maka data hasil penelitian tidak boleh mengalami multikolinearitas. Adapun hasil analisis data untuk uji multikolinearitas data penelitian adalah sebagai berikut :

disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada data hasil penelitian. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$  (sebelumnya) sehingga data hasil penelitian dapat dianalisis dengan analisis regresi linear berganda.

### 3) Uji Heteroskedastisitas

Ujiheteroskedastisitasdilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual atas suatu pengamatan ke pengamatan lain. Adapun hasil analisis data untuk uji hetroskedastisitasumber daya alamta penelitian adalah sebagai berikut

**Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

No	Variabel	Sig
1	SDA (X1)	0,091
2	SDM (X2)	0,557

Sumber : Pengolahan data sekunder, 2013

Berdasarkan analisis data untuk uji heteroskedastisitas terlihat bahwa nilai signifikansi dari semua variabel bebas adalah lebih besar dari tingkat signifikan yang digunakan ( $\alpha = 0,05$ ). Jadi dapat dikatakan bahwa data hasil penelitian tidak mengalami kasus heteroskedastisitas.

### Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk membuktikan hipotesis yang diajukan, digunakan analisis regresi linear berganda dengan pendekatan OLS (*Ordinal Least Square*). Hasil analisis regresi linear berganda yang telah penulis lakukan dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini :

**Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

No	Variabel	Koefisien	t hitung	Sig.
1	Kontanta	- 13.054,082		
2	SDA (X1)	41,702	2,288	0,003
3	SDM (X2)	79,057	0,121	0,213

Sumber : Pengolahan data primer, 2013

Nilai koefisien regresi masing-masing variabel dapat tuliskan ke dalam persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$\hat{Y} = - 13.054,082 + 41,702 X_1 + 79,057 X_2$$

Nilai koefisien dari masing-masing variabel dapat diartikan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta (a) sebesar - 13.054,082 berarti tanpa adanya pengaruh dari sumber daya alam dan sumber daya manusia maka nilai penerimaan daerah hanyalah sebesar - 13.054,082. Tanda minus pada konstanta berarti nilai variabel penerimaan daerah sebelum dipengaruhi sumber daya alam dan sumber daya manusia nilainya sangat kecil tetapi dengan adanya pengaruh dari kedua variabel tersebut nilai dari variabel penerimaan daerah akan mengalami peningkatan karena kedua variabel bebas mempunyai tanda koefisien regresi positif.
2. Nilai koefisien regresi dari variabel sumber daya alam ( $X_1$ ) adalah sebesar 41,702. Hal ini berarti dengan adanya peningkatan sumber daya alam dalam setiap satuannya akan dapat meningkatkan penerimaan daerah (Y)

sebesar 41,702 dalam setiap satuannya. Dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan (*ceteris paribus*).

3. Nilai koefisien regresi dari variabel sumber daya manusia ( $X_2$ ) adalah sebesar 79,057. Hal ini berarti dengan adanya peningkatan dari sumber daya manusia dalam setiap satuannya akan dapat meningkatkan nilai penerimaan daerah (Y) sebesar 79,057 dalam setiap satuannya. Dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan (*ceteris paribus*).
4. Nilai *R-Square*) sebesar 0,817, hal ini berarti besarnya pengaruh dari sumber daya alam dan sumber daya manusia terhadap penerimaan daerah adalah 81,70% dan sisanya sebesar 28,30 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masukan ke dalam model penelitian.
5. Nilai F hitung adalah 38,751 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Jika nilai signifikansi dibandingkan dengan alpha ( $\alpha = 0,05$ ) maka terbukti bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari alpha ( $0,000 < 0,05$ ). Hal ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan sumber daya alam dan dan potensi sumber daya manusia secara bersama-sama terhadap

- penerimaan daerah. Dengan demikian hipotesis pertama dapat diterima pada tingkat kepercayaan 95%.
6. Hasil analisis regresi linear berganda diketahui bahwa nilai koefisien regresi variabel potensi sumber daya alam ( $X_1$ ) adalah sebesar 41,702 dengan nilai signifikansi sebesar 0,003. Jika nilai signifikansi dibandingkan dengan alpha ( $\alpha = 0,05$ ), maka terbukti bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari alpha ( $0,003 < 0,05$ ). Hal ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan sumber daya alam terhadap penerimaan daerah. Dengan demikian hipotesis kedua dapat diterima pada tingkat kepercayaan 95%. Tanda koefisien regresi dari variabel sumber daya alam yang bertanda positif menunjukkan terjadi pengaruh yang searah dari sumber daya alam terhadap penerimaan daerah. Artinya semakin tinggi nilai sumber daya alam yang dimiliki maka semakin tinggi pula penerimaan daerah.
  7. Hasil analisis regresi linear berganda diketahui bahwa nilai koefisien regresi dari variabel sumber daya manusia ( $X_2$ ) adalah 79,057 dengan nilai signifikansi 0,213. Jika nilai signifikansi dibandingkan dengan alpha ( $\alpha = 0,05$ ) maka terbukti bahwa nilai signifikansi lebih besar dari alpha ( $0,213 > 0,05$ ). Hal ini berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan sumber daya manusia terhadap penerimaan daerah. Dengan demikian hipotesis ketiga tidak dapat diterima ( $H_a$  ditolak atau  $H_0$  diterima).

### **Pembahasan Hasil Penelitian Pengaruh Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia Secara Bersamaan Terhadap Penerimaan Daerah**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama diketahui bahwa terdapat pengaruh signifikan sumber daya alam dan sumber daya manusia terhadap penerimaan daerah. Dengan terjadinya peningkatan sumber daya alam dan peningkatan dari sumber daya manusia maka akan dapat meningkatkan penerimaan daerah.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah serta antar propinsi dan kabupaten atau kota yang merupakan prasyarat sistem pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang di gali murni dari masing-masing daerah, sebagai sumber keuangan daerah yang digunakan untuk membiayai pengadaan pembelian dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembangunan daerah yang tercermin dalam anggaran pembangunan.

Temuan penelitian ini konsisten dengan pendapat Boediono (2002:61) yang menyatakan bahwa apabila potensi sumber daya alam, industri dan sumber daya manusia semakin baik maka kemampuan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah akan semakin baik.

Temuan penelitian ini didukung oleh pendapat Mardiasmo (2004:49) bahwa potensi penerimaan daerah dapat ditingkatkan dengan cara menggali sumber-sumber pendapatan daerah diantaranya melalui peningkatan pengelolaan sumber daya alam yang tersedia, hal ini dimungkinkan terjadi karena pada saat ini pemerintah daerah pada umumnya kurang mampu mengelola potensi sumber daya alam yang tersedia di daerah.

Sepanjang potensi sumber keuangan daerah belum mencukupi, pemerintah pusat memberikan sejumlah sumbangan kepada pemerintah daerah. Dengan demikian bagi pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, di samping mendapat bantuan dari pemerintah pusat juga mendapat limpahan dari pemda Tingkat I Propinsi. Meskipun bisa jadi limpahan dana dari propinsi tersebut juga berasal dari pemerintah pusat lewat APBN. Berbagai penelitian empiris yang pernah dilakukan menyebutkan bahwa dari ketiga

sumber pendapatan daerah seperti tersebut di atas, peranan dari pendapatan yang berasal dari pusat sangat dominan. diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam pembiayaan pembangunan di daerah hingga kualitas otonomi makin baik. Untuk mewujudkannya UU No 33 tahun 2004 memberi kewenangan lebih luas kepada daerah untuk mengelola keuangan dan diperkuat oleh UU No 32 Tahun 2004 untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menggalakkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dan meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu secara nyata dan bertanggung jawab. Untuk meningkatkan kualitas otonomi diperlukan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri. Pemerintah daerah menuntut mampu menggali potensi yang dimiliki daerahnya sebagai sumber penerimaan asli daerah dalam upaya meningkatkan kemandirian daerah.

Menurut Halim (2001:175) ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; (2) Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kedua ciri tersebut akan mempengaruhi pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Secara konseptual, pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah harus sesuai dengan kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan. Oleh karena itu, untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber yang harus selalu dan terus menerus dipacu

pertumbuhannya, karena PAD merupakan indikator penting untuk memenuhi tingkat kemandirian pemerintah di bidang keuangan. Semakin tinggi peranan PAD terhadap APBD maka semakin berhasil usaha pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Temuan penelitian ini membuktikan bahwa dalam upaya peningkatan kemandirian daerah pemerintah daerah juga dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif di daerah. Tiga sektor yang perlu mendapat perhatian yaitu sektor sumber daya alam, industri dan sumber daya manusia. Apabila ketiga sektor dapat digali secara optimal pada Kabupaten Lima Puluh Kota tentunya akan menunjang terhadap peningkatan penerimaan daerah setiap tahunnya karena Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang digali murni dari masing-masing daerah, sebagai sumber keuangan daerah yang digunakan untuk membiayai pengadaan pembelian dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembangunan daerah yang tercermin dalam anggaran pembangunan.

### **Pengaruh Sumber Daya Alam Terhadap Penerimaan Daerah**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan positif sumber daya alam terhadap penerimaan daerah. Dimana dengan terjadinya peningkatan dari potensi sumber daya alam akan meningkatkan penerimaan daerah.

Potensi sumber daya alam perlu ditingkatkan secara komprehensif agar mengalami peningkatan yang berarti, karena potensi sumber daya alam berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan daerah. Dengan demikian potensi tersebut perlu dioptimalkan pengelolaannya melalui kebijakan dengan memperhatikan dampak negatif dari pengelolaan tersebut.

Temuan penelitian ini konsisten dengan teori yang dikemukakan oleh Kuncoro (2004:76) yang menyatakan bahwa sumber daya alam yang dimiliki suatu daerah akan menentukan tingkat penerimaan daerah. Daerah yang memiliki sumber daya alam yang banyak dan dapat dikelola secara baik tentunya akan berkontribusi positif terhadap jumlah penerimaan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 bahwa dalam rangka pembiayaan pelaksanaan desentralisasi, kepada daerah dialokasikan dana perimbangan yang terdiri dari bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), penerimaan sumber daya alam (SDA), dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Bagi daerah-daerah yang mempunyai potensi sumber daya alam yang banyak, maka secara logika potensi sumber keuangannya akan lebih besar dari daerah yang mempunyai sumber daya alam yang kecil. Namun perlu disadari bahwa potensi sumber daya alam tersebut sebagian besar (terutama galian tambang) merupakan sumber keuangan daerah yang bersifat terbatas eksploitasinya dan tidak dapat diperbaharui (unrenewable), sehingga cepat atau lambat sumber tersebut akan habis.

Kuncoro (2004:187) menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya alam dan energi mempunyai tujuan akhir yaitu kesejahteraan masyarakat (social welfare) dengan tujuan antara sebagai sumber devisa, pemenuhan kebutuhan manusia, pelestarian lingkungan, pembangunan daerah/masyarakat dan pemerataan. Dengan demikian pengelolaan harus bersifat normatif dan seharusnya mempertahankan rasio cadangan dengan pemakaian, harga yang wajar, royalty yang wajar dan rasio K/L yang relatif seimbang.

Menurut Devas, et.al (1989:179) tujuan hubungan pusat dan daerah menyangkut pembagian tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu antara tingkat pemerintahan dan pembagian sumber penerimaan untuk

menutup pengeluaran akibat kegiatan-kegiatan tersebut, dengan tujuan utamanya untuk mencapai keseimbangan antara berbagai pembagian berdasarkan potensi dan sumber daya masing-masing daerah.

Era Otda tidak disikapi baik oleh aparat Pemda, DPRD maupun warga masyarakat dengan kematangan berfikir, bersikap dan bertindak. Masing-masing elemen masyarakat lebih menonjolkan hak dari pada kewajiban dalam mengatur dan mengurus sesuatu yang menjadi kepentingan umum. Dengan kata lain, masing-masing lebih mengedepankan egonya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Pemahaman terhadap Otda yang keliru, baik oleh aparat maupun oleh warga masyarakat menyebabkan pelaksanaan Otda menyimpang dari tujuan mewujudkan masyarakat yang aman, damai dan sejahtera. Keterbatasan sumberdaya dihadapkan dengan tuntutan kebutuhan dana (pembangunan dan rutin operasional pemerintahan) yang besar, memaksa Pemda menempuh pilihan yang membebani rakyat, misalnya memperluas dan atau meningkatkan objek pajak dan retribusi, menguras sumberdaya alam yang tersedia, dll. Kesempatan seluas-luasnya yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan mengambil peran, juga sering disalahartikan, seolah-olah merasa diberi kesempatan untuk mengeksploitasi sumber daya alam dengan cara masing-masing semauanya sendiri.

Di pihak lain, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang seharusnya berperan mengontrol dan meluruskan segala kekeliruan implementasi Otda tidak menggunakan peran dan fungsi yang semestinya, bahkan seringkali mereka ikut terhanyut dan berlomba mengambil untung dari perilaku aparat dan masyarakat yang salah. Semua itu terjadi karena Otda lebih banyak menampilkan nuansa kepentingan pembangunan fisik dan ekonomi. Akibatnya terjadi percepatan kerusakan hutan dan lingkungan yang berdampak pada percepatan sumber daya air hampir di seluruh wilayah tanah air. Eksploitasi hutan dan lahan yang tak terkendali juga

telah menyebabkan hancurnya habitat dan ekosistem satwa liar yang berdampak terhadap punahnya sebagian varietas vegetasi dan satwa langka serta mikro organisme yang sangat bermanfaat untuk menjaga kelestarian alam.

Temuan penelitian ini membuktikan bahwa sumber daya alam yang cukup melimpah sampai pada saatnya untuk dimanfaatkan secara efisien dan harus merujuk pada pengamanan lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam yang boros, maka di masa mendatang, kita akan menjadi penonton dan kekurangan bahan baku. Kemudian diketahui bahwa keberadaan hutan alam yaitu hutan sekunder juga belum disentuh sama sekali. Padang alang-alang, gulma pisang hutan (Abaca), eceng gondok juga tidak dimanfaatkan, bahkan menjadikan problema yang cukup serius. Sektor perkebunan juga belum dimanfaatkan, seperti limbah tandan kosong sawit, pelepah, pohon karet yang tidak produktif. Sektor perikanan yang sampai saat ini, system pengolahan pasca panen ikan hanya dibuat ikan asin secara tradisional dan tidak jarang ikan asin disemprot minyak tanah atau baygon untuk tujuan tertentu. Pasca panen buah pisang, durian, rambutan juga belum diatasi secara baik. Buah-buah tersebut hanya dipasarkan secara tradisional dan belum ada industri pasca panen/sistem pengolahan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

### **Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Penerimaan Daerah**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga diketahui bahwa sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan daerah. Dari temuan penelitian ini diketahui bahwa potensi sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota tidak mempengaruhi penerimaan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota mulai dari tahun 1980 sampai tahun 2009. Hal ini disebabkan sedikitnya angkatan kerja yang bekerja di sektor perekonomian yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Sebahagian besar angkatan kerja bekerja

pada sektor perekonomian di luar Kabupaten Lima Puluh Kota. Masih banyak angkatan kerja yang bekerja pada sektor informal yang tentunya tidak memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah.

Berdasarkan temuan penelitian pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota perlu membuat kebijakan tentang pemanfaatan sumber daya manusia melalui Balai Latihan Kerja dan kebijakan untuk memotivasi angkatan kerja untuk mau bekerja pada sektor perekonomian yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota dan sektor formal.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh yang signifikan SDA dan SDM terhadap penerimaan daerah. Dengan terjadinya peningkatan dari nilai SDA, dan peningkatan dari SDM maka akan dapat meningkatkan penerimaan daerah. Temuan penelitian ini membuktikan bahwa tinggi rendahnya tingkat penerimaan daerah setiap periode akan dipengaruhi oleh sumber daya alam dan sumber daya manusia..
2. Terdapat pengaruh yang signifikan positif potensi SDA terhadap penerimaan daerah. Dimana dengan terjadinya peningkatan dari potensi SDA akan meningkatkan penerimaan daerah. Dari temuan penelitian ini diketahui bahwa potensi penerimaan pada sektor sumber daya alam akan mempengaruhi tingkat penerimaan daerah, dimana dengan terjadinya peningkatan dari pendapatan sektor sumber daya alam tentunya akan meningkatkan penerimaan daerah..
3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari potensi SDM terhadap penerimaan daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dimana dengan terjadinya peningkatan dari potensi SDM belum tentu

meningkatkan penerimaan daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota.

### Implikasi Kebijakan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian ini maka implikasi kebijakan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota perlu mengambil kebijakan dalam usaha meningkatkan penerimaan daerah melalui peningkatan dari sektor sumber daya alam dan sumber daya manusia. Untuk meningkatkan penerimaan daerah dari ketiga potensi tersebut perlu dilahirkan payung hukumnya dalam bentuk Perda dan Keputusan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) perlu membuat kebijakan untuk meningkatkan penerimaan daerah dengan mengoptimalkan penerimaan dari sektor potensi sumber daya alam dengan selalu memperhatikan ekosistem disertai payung hukumnya (Perda).
3. Pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota perlu melakukan berbagai upaya yang dapat mendorong berdirinya industri-industri baru dan meningkatkan industri yang sudah ada melalui kebijakan dan mencari peluang pasar serta meningkatkan kemampuan bersaing, meningkatkan modal serta mencari peluang ekspor dari komoditi andalan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota serta meningkatkan investasi dari luar dengan payung hukum (Perda).
4. Pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota harus berupaya semaksimal mungkin untuk peningkatan dari

potensi sumber daya manusia agar dapat memberi kontribusi terhadap penerimaan daerah melalui kebijakan yang mampu meningkatkan motivasi mau bekerja di sektor perekonomian yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota dan bekerja di sektor sumber daya alam dan sektor industri serta mau berpindah dari sektor informal ke sektor formal dan kebijakan untuk menarik angkatan kerja mau bekerja di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan jaminan perlindungan hukum (Perda).

### DAFTAR PUSTAKA

10.22202/economica.2014.v3.i1.235

- Boediono. 2002. *Dana Alokasi Umum : Konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah*. Jakarta : Buku Kompas
- Halim, Abdul. 2001. *Analisis Deskriptif Pengaruh Fiscal Stress pada APBD Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah*. KOMPAK STIE YO. Yogyakarta. Hal: 127-146.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Penerbit Erlangga.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*. Alfabeta :Bandung
- UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 pasa 3, tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah